

# Tarcza Wschód Programme: Penguatan Modernisasi Strategi Pertahanan Polandia Di Suwałki Land Corridor Tahun 2024

Carissa Nayla Maharani<sup>1\*</sup>, Wishnu Mahendra Wiswayana<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Brawijaya

Corresponding Author's e-mail : [carissamhrn@student.ub.ac.id](mailto:carissamhrn@student.ub.ac.id)<sup>1\*</sup>, [wishnu.mahendra@ub.ac.id](mailto:wishnu.mahendra@ub.ac.id)<sup>2</sup>



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3 Juni 2026

Page: 1090-1107

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2655>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2655>

Article History:

Received: 08-04-2026

Revised: 22-05-2026

Accepted: 19-06-2026

**Abstract** : The dissolution of the Warsaw Pact in 1991 opened up strategic policy space for Poland, which subsequently joined NATO in 1999 as a guarantee of collective security. However, the annexation of Crimea, the deployment of Iskander-M missiles in Kaliningrad, and the post-2020 geopolitical shift of Belarus have created a two-directional military pressure threatening the Suwałki Gap, a strategic land corridor connecting Poland and Lithuania that also serves as NATO's only land access to the Baltic states. This study aims to analyze why Poland accelerated its defense modernization strategy through the Tarcza Wschód (Eastern Shield) Programme in the Suwałki Gap in 2024. Employing a qualitative approach with document analysis and Mearsheimer's framework of conventional deterrence, the study finds that the Homeland Defence Act primarily focused on deterrence by punishment (building combat power) but left a gap in physical defense infrastructure. The study concludes that Poland integrates both deterrence mechanisms, namely deterrence by punishment and deterrence by denial, to convince Russia that any aggression against the Suwałki Gap cannot achieve a quick and decisive victory at a tolerable cost, while simultaneously compensating for the structural limitations of NATO's collective commitment.

**Keywords**: Tarcza Wschód, Suwałki Gap, conventional deterrence, Polish defense modernization, NATO.

**Abstrak** : Pembubaran Pakta Warsawa pada 1991 membuka ruang kebijakan pertahanan bagi Polandia, yang kemudian memilih bergabung dengan NATO pada 1999 sebagai jaminan keamanan kolektif. Namun, aneksasi Krimea, pengerahan rudal Iskander-M di Kaliningrad, serta perubahan posisi geopolitik Belarus pasca-2020 telah menciptakan tekanan militer dua arah yang mengancam Koridor Suwałki sebagai jalur darat strategis penghubung Polandia-Lithuania sekaligus satu-satunya akses darat NATO menuju negara-negara Baltik. Penelitian ini bertujuan menganalisis mengapa Polandia melakukan penguatan modernisasi strategi pertahanan melalui Program *Tarcza Wschód* (*Eastern Shield*) di Koridor Suwałki pada tahun 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis dokumen serta kerangka *conventional deterrence* Mearsheimer, penelitian ini menemukan bahwa *Homeland Defence Act* lebih berfokus pada *deterrence by punishment* (peningkatan kekuatan tempur) namun meninggalkan kesenjangan infrastruktur pertahanan fisik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Polandia menggabungkan kedua mekanisme pencegahan *punishment* dan *denial* guna meyakinkan Rusia bahwa agresi terhadap Koridor Suwałki tidak akan menghasilkan kemenangan cepat dengan biaya yang masih dapat ditoleransi, sekaligus melengkapi keterbatasan komitmen kolektif NATO.

**Kata kunci**: *Tarcza Wschód*, Koridor Suwałki, *conventional deterrence*, modernisasi pertahanan Polandia, NATO.

## PENDAHULUAN

Pembubaran Pakta Warsawa pada 1991 membuka ruang kebijakan pertahanan bagi Polandia yang selama lebih dari empat dekade sebelumnya terintegrasi penuh dalam sistem komando militer Uni Soviet. Berakhirnya aliansi tersebut menempatkan Polandia pada persimpangan strategis yang memaksa para pembuat kebijakan di Warsawa untuk menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana membangun kembali arsitektur pertahanan nasional tanpa kerangka perlindungan kolektif yang telah hilang (Dall dan Duarte, 2022). Dalam kondisi transisi yang penuh ketidakpastian tersebut, keputusan bergabung dengan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) pada 1999 dipandang sebagai satu-satunya jaminan keamanan yang kredibel terhadap kemungkinan kebangkitan tekanan militer dari arah timur.

Keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua faktor yang secara bersama-sama membentuk persepsi ancaman Polandia secara struktural. Faktor pertama adalah kondisi geografis Polandia yang berada di kawasan Dataran Eropa Utara yang terbuka dan minim penghalang alam, sehingga sepanjang sejarah menjadikan wilayah ini sebagai koridor yang rentan terhadap penetrasi militer dari berbagai arah (Zikri dan Hanapi, 2021). Faktor kedua adalah pengalaman historis yang tertanam dalam memori kolektif bangsa. Sejak periode 1772 hingga 1795, wilayah Polandia telah tiga kali dipartisi oleh Rusia, Prusia, dan Austria, sebuah pengalaman yang menghapus Polandia dari peta Eropa selama 123 tahun dan membentuk kesadaran institusional bahwa tanpa sistem pertahanan kolektif yang kuat, posisi geografisnya akan selalu menjadi titik lemah yang mudah dieksploitasi oleh kekuatan eksternal (Sus, 2025). Kedua faktor inilah yang menjadikan keanggotaan NATO bukan sekadar pilihan politik, melainkan imperatif keamanan yang berakar dari pengalaman sejarah yang panjang.

Meskipun keanggotaan NATO memberikan jaminan keamanan kolektif, titik perubahan paling signifikan dalam persepsi ancaman Polandia dimulai dari aneksasi Krimea oleh Rusia pada 2014. Peristiwa ini secara struktural membuktikan bahwa Rusia bersedia menggunakan kekuatan militer konvensional untuk mengubah batas wilayah negara berdaulat di Eropa, sebuah konfirmasi empiris atas skenario ancaman yang selama ini dianggap berlebihan oleh sebagian kalangan (Perwita dan Rachmawati, 2018). Rerung (2020) menjelaskan bahwa peningkatan kapabilitas militer Rusia pasca-2014 menciptakan perubahan distribusi kekuatan yang signifikan di kawasan Baltik, terutama melalui modernisasi sistem persenjataan strategis di Kaliningrad dan *Western Military District* yang secara langsung memperluas jangkauan proyeksi kekuatan Rusia hingga menjangkau wilayah Polandia.

Pada level domestik, runtuhnya Pakta Warsawa memaksa Polandia untuk merombak total sistem wajib militer, doktrin pertahanan teritorial, serta rantai komando yang selama ini tersambung secara vertikal ke Moskwa. Banyak perwira tinggi yang dididik dalam tradisi militer Soviet harus menjalani pelatihan ulang atau digantikan oleh generasi baru yang lebih terbuka terhadap pengaruh Barat. Proses ini berlangsung selama hampir satu dasawarsa penuh dan sering kali diwarnai oleh ketegangan internal antara mereka yang ingin sepenuhnya meninggalkan warisan lama dan kelompok yang lebih berhati-hati dalam melakukan perubahan radikal. Namun demikian, momentum 1991 tetap menjadi titik nol dari kesadaran strategis modern Polandia, yaitu bahwa tidak ada satu pun kekuatan eksternal yang secara otomatis akan melindungi kedaulatan negara. Dengan bubarnya Pakta Warsawa, Polandia belajar bahwa aliansi bersifat sementara dan loyalitas geopolitik dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga satu-satunya jaminan keamanan yang paling meyakinkan adalah pertahanan nasional yang kuat, modern, dan dikelola secara mandiri. Kesadaran inilah yang kemudian mengendap selama tiga dekade sebelum akhirnya meledak menjadi percepatan modernisasi besar-besaran setelah tahun 2022 (Czulda, 2023).

Dalam jaminan keamanan nasionalnya, Polandia menandai titik perubahan sejak dimulainya aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014. Peristiwa ini secara struktural

membuktikan bahwa Rusia bersedia menggunakan kekuatan militer konvensional untuk mengubah batas wilayah negara berdaulat di Eropa. Bagi Polandia dan negara-negara Baltik, aneksasi Krimea bukan sekadar krisis geopolitik, melainkan konfirmasi langsung atas skenario ancaman yang selama ini dianggap sebagian pihak berlebihan. Peningkatan kapabilitas militer Rusia pasca-2014 menciptakan perubahan distribusi kekuatan yang signifikan di kawasan Baltik, terutama melalui modernisasi sistem persenjataan strategis di Kaliningrad dan *Western Military District* yang secara langsung memperluas jangkauan proyeksi kekuatan Rusia hingga menjangkau wilayah Polandia (Rerung, 2020). Terlebih lagi, sejak 2016, Rusia secara permanen menempatkan sistem rudal balistik Iskander-M di Oblast Kaliningrad dengan jangkauan hingga 500 kilometer. Rudal ini mampu menjangkau infrastruktur militer kritis Polandia, termasuk pangkalan udara, pelabuhan, dan pusat komando, dalam hitungan menit sejak konflik dimulai (Czulda, 2023). Sistem Iskander-M juga dirancang untuk menciptakan zona *anti-access/area denial* (A2/AD) yang membatasi ruang gerak operasional NATO di kawasan Baltik dan secara sistematis mempersulit mobilisasi ke sayap timur (Shlapak & Johnson, 2016).

Eskalasi tekanan dari arah timur semakin kompleks ketika Belarus mengalami transformasi geopolitik pasca-krisis domestik tahun 2020. Rezim Lukashenko, setelah pemilu yang disengketakan memicu gelombang protes besar-besaran, memilih bergantung penuh pada dukungan Rusia sebagai basis legitimasi rezimnya. Konsekuensi dari pergeseran ini tidak hanya berdimensi politik, melainkan secara langsung membuka wilayah Belarus bagi pengerahan pasukan Rusia secara permanen, sehingga mengubah konfigurasi militer kawasan secara mendasar (Torbicka, 2025). Polandia kini tidak lagi menghadapi tekanan tunggal dari utara melalui Kaliningrad, melainkan busur tekanan militer dua arah: dari Kaliningrad di sisi barat laut dan dari Belarus di sisi timur. Dalam konfigurasi tekanan dua arah tersebut, kerentanan strategis Polandia terkonsentrasi secara spesifik pada wilayah Sayap Timur, yang sering disebut sebagai Koridor Suwałki (*Suwałki Land Corridor*). Ini adalah jalur darat sepanjang kurang lebih 65 kilometer yang menghubungkan Polandia dengan Lithuania, sekaligus satu-satunya akses darat yang mempertahankan kontinuitas teritorial negara-negara Baltik dengan daratan utama NATO (Parafianowicz, 2017). Koridor ini secara langsung diapit oleh Kaliningrad di sisi barat dan Belarus di sisi timur, menciptakan kondisi di mana kedua poros tekanan militer Rusia dapat bergerak secara bersamaan menuju satu titik yang sama.

Akumulasi tekanan tersebut mendorong Polandia mengesahkan *Homeland Defence Act* pada 11 Maret 2022, sebuah regulasi yang merombak total kerangka pertahanan nasional menjadi satu sistem yang berorientasi pada penguatan kapabilitas militer secara menyeluruh (Kobielski, 2022). Transformasi ini bertumpu pada peningkatan jumlah personel menuju target 300.000 prajurit, percepatan pengadaan alutsista berat, serta kenaikan anggaran pertahanan yang mendekati 4% PDB pada 2024 sehingga menjadikan Polandia sebagai anggota NATO dengan proporsi belanja pertahanan tertinggi di seluruh aliansi (Torbicka, 2025). Termasuk dalam regulasi ini adalah pembentukan Pasukan Pertahanan Teritorial yang secara khusus dirancang untuk beroperasi di wilayah perbatasan timur yang rawan terhadap ancaman hibrida (Marcinek dan Boston, 2023). Kendati demikian, modernisasi tersebut hanya menjawab seberapa besar kekuatan militer yang dapat dihimpun, sementara kesenjangan kapabilitas penolakan penetrasi di titik paling rawan masih belum terpenuhi (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025).

Konsekuensi paling kasatmata dari perubahan paradigma tersebut terlihat dari lonjakan alokasi sumber daya fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah keanggotaan Polandia di NATO. Ketika sebagian besar negara anggota NATO masih berusaha memenuhi target dua persen produk domestik bruto untuk belanja pertahanan, Polandia justru melesat melampaui

angka tersebut secara dramatis. Pada tahun 2024, pengeluaran sektor pertahanan Polandia mencapai hampir empat persen dari PDB, sebuah proporsi yang tidak hanya tertinggi di kawasan Eropa Tengah, tetapi juga yang tertinggi di seluruh tubuh NATO. Angka ini bukanlah sekadar statistik ekonomi mencerminkan tekad politik yang menganggap bahwa waktu untuk modernisasi tidak dapat lagi ditunda. Dengan lonjakan anggaran tersebut, Polandia mulai mengisi berbagai celah kritis dalam kemampuannya, mulai dari sistem pertahanan udara jarak menengah hingga artileri roket jarak jauh, serta mempercepat program pengadaan kendaraan tempur lapis baja yang sebelumnya berjalan lambat karena keterbatasan dana. Peningkatan anggaran yang tajam hingga mendekati empat persen PDB menyimpan sejumlah kompleksitas yang sering luput dari perhatian publik. Pertama, kemampuan menyerap belanja modal dalam jumlah besar dalam waktu singkat menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi pertahanan Polandia. Proses tender, sertifikasi teknis, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti pangkalan dan fasilitas perawatan tidak dapat dikejar hanya dengan mengucurkan dana secara cepat. Dalam banyak kasus, modernisasi yang tergesa-gesa berisiko menciptakan ketimpangan antara pengadaan peralatan baru dengan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Karena itu, *Homeland Defence Act* tidak hanya berbicara soal pembelian tank atau jet tempur, tetapi juga secara eksplisit mengatur tentang percepatan pelatihan cadangan dan perluasan program pendidikan militer di universitas-universitas Polandia. Hal ini menandakan bahwa para perancang kebijakan di Warsawa menyadari bahwa senjata canggih tanpa personel yang terlatih secara berkelanjutan hanyalah pajangan mahal di tengah ancaman nyata. Dari perspektif teknis militer, transformasi yang dimandatkan oleh *Homeland Defence Act* mencakup pembentukan cabang angkatan baru yang disebut Pasukan Pertahanan Teritorial, yang secara khusus dirancang untuk beroperasi di wilayah perbatasan timur yang rawan. Pasukan ini mengisi ruang antara polisi reguler dan angkatan darat garis depan, berfokus pada operasi anti-sabotase, pengamanan infrastruktur kritis, serta pemberian dukungan logistik cepat saat terjadi krisis. Keberadaan pasukan teritorial ini menjadi jembatan penting antara doktrin pertahanan konvensional dan kebutuhan nyata di lapangan, terutama karena ancaman dari Belarus dan Rusia seringkali mengambil bentuk serangan hibrida yang tidak sepenuhnya bersifat militer. Dengan demikian, modernisasi yang digerakkan oleh akumulasi tekanan geopolitik tersebut tidak hanya bersifat keras dalam bentuk tank dan rudal, tetapi juga lunak dalam bentuk penataan ulang relasi antara militer profesional dan masyarakat sipil di wilayah perbatasan.

Keberhasilan implementasi *Homeland Defence Act* pada akhirnya akan diukur bukan dari besarnya angka belanja pertahanan semata, tetapi dari sejauh mana Polandia mampu membangun sistem pertahanan yang tangguh, adaptif, dan tidak mudah terfragmentasi kembali oleh perubahan prioritas politik di masa depan. Dalam hal ini, pengalaman Polandia dapat menjadi pelajaran bagi negara-negara lain yang berada di zona abu-abu keamanan, terutama bagi anggota NATO di wilayah Baltik dan Skandinavia. Saat satu negara anggota aliansi memutuskan untuk melampaui standar minimum yang disepakati, hal itu secara tidak langsung memberikan tekanan moral dan politis kepada anggota lain untuk melakukan hal serupa. Dengan kata lain, langkah Polandia mengalokasikan hampir empat persen PDB untuk pertahanan bukan hanya sebuah keputusan teknis semata, melainkan sebuah pernyataan politik yang mengubah dinamika internal NATO secara keseluruhan. Dalam lanskap keamanan Eropa yang sedang bergolak, pernyataan semacam itu kadang lebih berharga daripada satu divisi tank tambahan sekalipun.

Akan tetapi, *Homeland Defence Act 2022* masih meninggalkan kesenjangan struktural pada kawasan Sayap Timur, khususnya *Suwałki Land Corridor*, sebagai titik rawan geografis yang paling rentan terhadap penetrasi militer (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025). Atas dasar kesenjangan

inilah, pada 18 Mei 2024, Perdana Menteri Donald Tusk secara resmi meluncurkan *Tarcza Wschód* sebagai jawaban strategis, yang kemudian ditegaskan melalui pernyataan resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Polandia (*Sztab Generalny Wojska Polskiego*) mengenai kondisi akhir yang hendak dicapai sebagai “*teren przygraniczny przygotowany do obrony i natychmiastowej projekcji sił*” (SGWP, 2024). Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: “Mengapa Polandia melakukan penguatan modernisasi strategi pertahanan melalui *Tarcza Wschód Programme* di *Suwałki Land Corridor* pada tahun 2024?”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif guna menganalisis implementasi Program *Tarcza Wschód* sebagai modernisasi strategi pertahanan darat Polandia di Koridor Suwałki pada periode 2024 dalam perspektif *conventional deterrence*. Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna suatu fenomena sosial melalui analisis mendalam terhadap teks, konteks, dan interpretasi kebijakan (Creswell, 2013). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena transformasi dalam penguatan strategi pertahanan melalui interpretasi dokumen kebijakan, analisis konteks geopolitik, serta pemaknaan mekanisme daya tangkal yang tidak dapat diukur semata melalui angka statistik.

Dalam teknik analisis data, penelitian ini menggunakan *document analysis* sebagai proses analisis yang berdasarkan pada prosedur yang dikembangkan oleh Bowen (2009). *Document analysis* merujuk pada prosedur sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen, yang melibatkan proses pemeriksaan dan interpretasi data guna memperoleh makna, mengembangkan pemahaman, serta membangun pengetahuan empiris. Proses analisis dalam teknik ini terdiri dari tiga tahapan yang saling terkait dan dilakukan secara iteratif. Tahap pertama adalah *skimming and reading*, yaitu pemeriksaan dokumen secara menyeluruh untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap kedua adalah *content analysis*, yakni proses mengorganisasikan informasi ke dalam kategori-kategori yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Tahap ketiga adalah *interpretation*, yaitu interpretasi terhadap keseluruhan kumpulan dokumen untuk mengidentifikasi pola penguatan strategis (Bowen, 2009).

Dokumen yang dijadikan sumber analisis dalam penelitian ini meliputi regulasi resmi pemerintah Polandia termasuk *Homeland Defence Act 2022* dan *Tarcza Wschód 2024*, presentasi resmi Staf Umum Angkatan Bersenjata Polandia (*Sztab Generalny Wojska Polskiego*) tertanggal 27 Mei 2024, laporan lembaga kajian strategis internasional seperti *RAND Corporation* dan *Konrad-Adenauer-Stiftung*, serta literatur akademis yang diterbitkan dalam jurnal terindeks. Pemilihan dokumen didasarkan pada relevansi dengan pertanyaan penelitian, otoritas sumber, serta cakupan temporal yang sesuai dengan periode penelitian tahun 2022 hingga 2024.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan *Conventional Deterrence* Dalam Melihat Modernisasi Suatu Negara

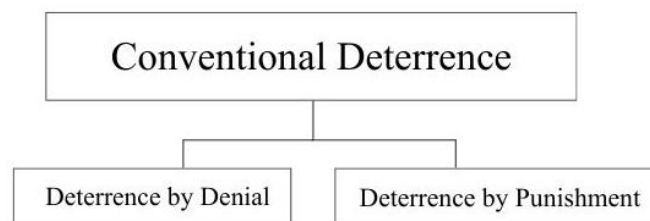
*Conventional deterrence* merupakan konsep yang merujuk pada strategi pencegahan konflik dengan menggunakan atau mengancam penggunaan kekuatan militer non-nuklir untuk memengaruhi kalkulasi lawan agar tidak melakukan serangan. Dalam kajian *strategic studies*, *deterrence* dipahami sebagai upaya mencegah tindakan lawan melalui penciptaan konsekuensi yang dianggap terlalu mahal, berisiko, atau sulit dimenangkan. Konsep ini berbeda dengan *nuclear deterrence* yang mengandalkan ancaman senjata nuklir, karena *conventional deterrence* lebih berfokus pada penggunaan kekuatan militer konvensional, seperti angkatan darat, laut, dan udara untuk mencegah agresi atau serangan (Mearsheimer, 1983).

Landasan teoritis mengenai deterrence konvensional mulai dibangun oleh Thomas Schelling melalui karyanya “*The Strategy of Conflict* dan *Arms and Influence*”, yang menekankan ancaman pembalasan sebagai inti dari strategi pencegahan (Schelling, 1960, 1966). Gagasan tersebut kemudian dikembangkan oleh Glenn Snyder dalam “*Deterrence and Defense*”, yang menekankan pentingnya kemampuan militer sebagai elemen utama dalam efektivitas deterrence (Snyder, 1961). Namun, kerangka Snyder masih menyisakan keterbatasan karena belum menjelaskan secara rinci bagaimana kapabilitas militer konvensional dapat bekerja secara efektif dalam mencegah agresi lawan.

Dalam keterbatasan tersebut, Mearsheimer (1983) kemudian mengembangkan konsep *conventional deterrence* dengan menegaskan bahwa daya tangkal berhasil ketika calon agresor meyakini bahwa tidak ada strategi ofensif yang dapat menjamin kemenangan cepat dengan biaya yang masih dapat ditoleransi. Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam karyanya: “*deterrence works when the attacker believes that it cannot achieve a quick and decisive victory*” (Mearsheimer, 1983, p. 23). Dalam kerangka ini, yang dicegah bukanlah niat menyerang secara moral, melainkan kalkulasi rasional calon agresor mengenai peluang keberhasilan operasional. Dengan demikian, Rusia diposisikan sebagai potential aggressor yang memiliki kapabilitas dan kesempatan untuk melancarkan operasi militer terhadap Koridor Suwałki, meskipun belum melakukan serangan secara nyata.

Hal yang perlu ditekankan secara khusus adalah bahwa kerangka *conventional deterrence* tidak hanya menjelaskan respons terhadap ancaman aktual, tetapi juga menjelaskan mengapa suatu negara melakukan modernisasi pertahanan bahkan ketika belum ada serangan yang sedang berlangsung. Mearsheimer (1983) menegaskan bahwa negara yang bertindak rasional membangun kapabilitas pertahanan justru ketika ancaman masih bersifat potensial, karena ketika ancaman telah berubah menjadi aktual, jendela waktu untuk membangun pertahanan yang memadai telah tertutup sepenuhnya. Dalam perspektif inilah modernisasi pertahanan Polandia merupakan manifestasi dari logika pencegahan yang bersifat antisipatif.

### Bagan 1. Kategori *Conventional Deterrence*



**Sumber:** Penulis

Mearsheimer (1983) mengembangkan dua logika mekanisme pencegahan yang bekerja secara berbeda. Pada logika pertama, *deterrence by punishment* bekerja dengan meyakinkan calon agresor bahwa meskipun penetrasi awal berhasil dilakukan, dengan menghadapi pembalasan yang menjadikan keberhasilan taktis tersebut tidak sebanding dengan kerugian strategis yang harus ditanggung dalam jangka panjang (Mearsheimer, 1983, p. 30-35). Sebaliknya, pada logika kedua *deterrence by denial* bekerja pada level kalkulasi sebelum serangan dimulai, dengan membangun postur pertahanan yang meyakinkan calon agresor bahwa serangannya tidak akan mampu

mencapai tujuan militer sejak fase awal operasi, sehingga keputusan untuk menyerang menjadi tidak rasional bahkan sebelum perang dimulai (Mearsheimer, 1983, p. 58-60).

**Ancaman Kekuatan Blok Timur pada Kerentanan Suwałki Koridor**

Modernisasi pertahanan Polandia tidak dapat dipisahkan dari kondisi geografisnya yang secara langsung membentuk dimensi ancaman dari Blok Timur. Sebagai negara yang berada di kawasan Eropa Tengah-Timur, Polandia berbatasan dengan Jerman di sebelah barat, Laut Baltik dan eksklave Rusia Kaliningrad di utara, Lithuania dan Belarus di timur laut, Ukraina di timur, serta Ceko dan Slovakia di selatan. Keseluruhan wilayah Polandia berada di atas Dataran Eropa Utara yang bersifat terbuka dan minim penghalang alam, sehingga secara historis kawasan ini menjadi koridor yang rentan terhadap penetrasi militer dari berbagai arah (Zikri dan Hanapi, 2021). Kesadaran atas kerentanan geografis ini secara eksplisit tercermin dalam Strategi Keamanan Nasional Polandia tahun 2020, yang menetapkan bahwa pertahanan wilayah nasional merupakan prioritas absolut dan bahwa kondisi geografis Polandia menuntut pembangunan postur militer yang mampu menciptakan hambatan efektif terhadap ancaman konvensional dari arah timur (*National Security Strategy of the Republic of Poland, 2020*).

**Gambar 1. Peta Geografis Polandia**



*Sumber: Mapping Digiworld Pvt Ltd., 2026*

Kerentanan geografis Polandia semakin dipertegas oleh keberadaan Kaliningrad Oblast yang berjarak kurang dari 200 kilometer dari jantung wilayah Polandia. Sejak tahun 2016, Rusia secara permanen menempatkan sistem rudal balistik Iskander-M di Kaliningrad dengan jangkauan operasional hingga 500 kilometer. Dengan jangkauan tersebut, rudal ini mampu menjangkau infrastruktur militer kritis Polandia, termasuk pangkalan udara, pelabuhan strategis, dan pusat komando, dalam hitungan menit sejak konflik dimulai (Czulda, 2023). Sistem Iskander-M tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer konvensional, tetapi juga menjadi bagian penting dari

strategi *anti-access/area denial* (A2/AD) Rusia yang bertujuan membatasi pergerakan dan operasi militer NATO di kawasan Baltik. Strategi A2/AD ini memungkinkan Rusia menghambat pengiriman pasukan tambahan (*reinforcement*) dan memperlambat mobilisasi kekuatan NATO menuju wilayah sayap timur (Shlapak & Johnson, 2016).

Namun, ancaman terhadap Polandia tidak hanya berasal dari penguatan militer Rusia di Kaliningrad, tetapi juga dari perubahan posisi geopolitik Belarus setelah krisis politik domestik pada tahun 2020. Krisis tersebut dipicu oleh pemilu yang disengketakan dan memunculkan gelombang protes besar di Belarus. Dalam situasi itu, rezim Aleksandr Lukashenko semakin bergantung pada dukungan politik dan keamanan dari Rusia untuk mempertahankan stabilitas pemerintahannya. Kondisi ini kemudian mendorong Belarus membuka ruang yang lebih luas bagi kehadiran dan pengerahan militer Rusia di wilayahnya (Torbicka, 2025).

Perkembangan tersebut mengubah konfigurasi keamanan di kawasan Eropa Timur, khususnya bagi Polandia dan negara-negara Baltik. Jika sebelumnya tekanan strategis Rusia terhadap Polandia terutama berasal dari Kaliningrad Oblast, maka meningkatnya kedekatan militer Belarus dengan Rusia memperluas arah tekanan tersebut hingga mencakup wilayah Belarus di sisi timur Polandia. Akibatnya, tekanan strategis terhadap Polandia tidak lagi datang dari satu arah, melainkan dari dua kawasan sekaligus: Kaliningrad di sisi barat laut dan Belarus di sisi timur.

Konfigurasi ancaman dua arah ini kemudian menempatkan Koridor Suwałki (*Suwałki Land Corridor*) sebagai kawasan yang sangat strategis sekaligus rentan dalam sistem pertahanan NATO. Koridor Suwałki merupakan jalur darat sepanjang sekitar 65 hingga 100 kilometer yang menghubungkan Polandia dengan Lithuania, dan menjadi satu-satunya akses darat NATO menuju negara-negara Baltik (Parafianowicz, 2017). Posisi geografisnya yang berada tepat di antara Kaliningrad Oblast dan Belarus menyebabkan kawasan ini dipandang rentan, karena berpotensi menjadi titik pemutusan akses NATO menuju kawasan Baltik apabila terjadi eskalasi konflik dengan Rusia.

**Gambar 2. Peta *Suwałki Land Corridor***



**Sumber:** Shutterstock, 2022

Ancaman terhadap Koridor *Suwałki* tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga tercermin dalam berbagai aktivitas militer Rusia di kawasan Baltik. Menurut Torbicka (2025), Rusia dan Belarus beberapa kali melaksanakan latihan militer gabungan di wilayah Grodno yang berbatasan

langsung dengan koridor tersebut. Selain itu, sejak tahun 2013, Rusia secara berulang memasukkan skenario pemutusan Koridor Suwałki dalam simulasi operasional militernya. Pola latihan ini menunjukkan bahwa kawasan tersebut dipandang memiliki nilai strategis yang penting dalam kalkulasi militer Rusia terhadap NATO. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kerentanan strategis bagi NATO, karena Rusia dinilai memiliki kemampuan untuk memutus akses Koridor Suwałki dalam waktu 48 hingga 72 jam sebelum NATO mampu mengkonsolidasikan respons kolektifnya secara efektif (Shlapak & Johnson, 2016).

Apabila koridor tersebut berhasil diputus, akses darat NATO menuju Estonia, Latvia, dan Lithuania akan terhambat sehingga negara-negara Baltik berisiko mengalami isolasi militer dari wilayah utama aliansi. Isolasi tersebut tidak hanya membatasi mobilitas pasukan dan distribusi logistik NATO, tetapi juga mengurangi kemampuan aliansi untuk melakukan penguatan militer secara cepat pada fase awal konflik. Dalam kondisi demikian, Rusia berpotensi memperoleh keunggulan operasional karena dapat memanfaatkan keterlambatan respons NATO untuk mengkonsolidasikan posisi militernya, memperkuat penguasaan wilayah yang telah direbut, serta meningkatkan biaya yang harus ditanggung NATO apabila ingin membalikkan keadaan (Shlapak & Johnson, 2016).

Keberhasilan Rusia menciptakan kondisi tersebut pada dasarnya menghasilkan perubahan terhadap status quo keamanan yang sebelumnya berlaku di kawasan Baltik. Sebelum konflik terjadi, NATO memiliki akses darat yang memungkinkan aliansi menjalankan komitmen pertahanan kolektif terhadap Estonia, Latvia, dan Lithuania secara kredibel. Namun setelah Koridor Suwałki terputus, keseimbangan strategis tersebut berubah karena Rusia berhasil menciptakan fakta baru di lapangan yang menempatkan negara-negara Baltik dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan sebelumnya. Situasi ini memunculkan dilema bagi NATO. Di satu sisi, menerima kondisi tersebut berarti membiarkan Rusia memperoleh keuntungan strategis dan menunjukkan bahwa komitmen pertahanan kolektif NATO dapat diganggu melalui operasi militer cepat. Di sisi lain, upaya untuk memulihkan kondisi sebelumnya memerlukan pengerahan kekuatan militer yang jauh lebih besar dengan risiko eskalasi konflik langsung antara NATO dan Rusia (Kroenig, 2018).

Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi ketika agresor berhasil mengubah *status quo* secara cepat sebelum lawan mampu memberikan respons efektif dikenal sebagai *fait accompli*. *Fait accompli* merupakan strategi yang bertujuan menghasilkan fakta baru di lapangan yang telah terlanjur terbentuk sehingga lawan dihadapkan pada pilihan yang sama-sama mahal, yaitu menerima perubahan tersebut atau menanggung biaya yang sangat besar untuk mengembalikan kondisi sebelumnya. Dalam hal ini, *fait accompli* terjadi apabila Rusia berhasil memutus akses darat NATO menuju Baltik dan mengkonsolidasikan posisi militernya sebelum aliansi mampu melakukan respons kolektif. Pada titik tersebut, persoalan yang dihadapi NATO bukan lagi bagaimana mencegah perubahan status quo, melainkan apakah aliansi bersedia mengambil risiko eskalasi militer yang lebih luas untuk memulihkan status quo yang telah berubah. Oleh karena itu, ancaman terhadap Koridor Suwałki menjadi sangat signifikan karena membuka peluang bagi Rusia untuk memperoleh keuntungan strategis melalui penciptaan *fait accompli* yang dapat mengurangi kredibilitas *deterrence* NATO di kawasan Eropa Timur. Dengan kata lain, Rusia tidak perlu mengalahkan NATO secara keseluruhan untuk memperoleh keuntungan strategis. Rusia hanya perlu mencapai tujuan operasional tertentu dengan cepat dan kemudian memanfaatkan keraguan NATO terhadap risiko eskalasi untuk mempertahankan keuntungan tersebut (Morgan, 2003).

### **Keterbatasan Aliansi NATO Dalam Menjaga Wilayah Sayap Timur**

Respon NATO terhadap meningkatnya tekanan militer di sayap timur mengambil bentuk *enhanced Forward Presence* (eFP) yang diinisiasi pada KTT Warsawa 2016. Kerangka ini menempatkan empat batalion multinasional di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia sebagai sinyal komitmen kolektif di bawah Pasal 5 Perjanjian Atlantik Utara, dengan asumsi bahwa kehadiran fisik pasukan multinasional akan memengaruhi kalkulasi calon agresor melalui mekanisme *tripwire*, yaitu jaminan bahwa serangan terhadap satu anggota aliansi akan secara otomatis memicu respon seluruh aliansi (*Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia, 2025*).

**Gambar 3. Peta Empat Batalion Multinasional NATO**



*Sumber: Ministry of Foreign Affairs Republic of Latvia, 2021*

Namun dalam praktiknya, kerangka *enhanced Forward Presence* (eFP) NATO menyimpan keterbatasan struktural berlapis yang tidak dapat diselesaikan semata melalui penambahan kontribusi negara anggota. Keterbatasan inilah yang menjadi basis pembenaran strategis bagi Polandia untuk meluncurkan program *Tarcza Wschód* sebagai inisiatif pertahanan nasional yang bersifat mandiri. Keterbatasan pertama dan paling mendasar adalah dimensi kekuatan yang tidak memadai untuk fungsi pertahanan *denial* yang sesungguhnya. Keempat batalion eFP berjumlah sekitar 5.000 prajurit secara keseluruhan, dengan masing-masing *battlegroup* terdiri dari 1.000 hingga 1.500 personel (Shlapak dan Johnson, 2016). Sebagai perbandingan historis, pada puncak Perang Dingin, NATO mengerahkan delapan korps aliansi yang terdiri dari 20 divisi untuk mengamankan perbatasan antara Jerman Barat dan Pakta Warsawa, sebuah garis yang panjangnya sebanding dengan perbatasan modern negara-negara Baltik dengan Rusia.

Shlapak dan Johnson menegaskan bahwa kekuatan setingkat brigade berjumlah 4.000 hingga 5.000 prajurit per lokasi merupakan ambang minimum yang diperlukan bagi pertahanan mendalam yang kredibel, sementara eFP dalam konsepsi aslinya beroperasi jauh di bawah ambang tersebut (Shlapak & Johnson, 2016). Keterbatasan kedua berkaitan dengan karakter rotasional pengerahan yang menciptakan kesenjangan pengetahuan medan secara sistematis. Kontingen dari negara-negara kontributor yang bergantian dalam siklus rotasi memerlukan waktu adaptasi terhadap topografi lokal, jaringan jalan, titik-titik penyeberangan sungai, serta karakteristik pertahanan spesifik kawasan yang hanya dapat dipahami melalui pengalaman langsung dan berkelanjutan (Torbicka, 2025). O'Hanlon (2019) menegaskan bahwa pasukan yang ditempatkan secara permanen memiliki nilai yang tidak tergantikan dalam hal penguasaan medan lokal dan interoperabilitas dengan pasukan tuan rumah, dan bahwa kehadiran permanen di kawasan sayap timur merupakan langkah yang secara strategis mendesak bagi NATO (O'Hanlon, 2019).

Keterbatasan ketiga adalah absennya infrastruktur pertahanan fisik yang mendukung respons cepat di titik-titik paling rawan. Dalam kajian yang diterbitkan *International Affairs* Oxford, Mälksoo menegaskan bahwa pengembangan eFP bersifat *incremental, temporal, and reactive*, dengan kelemahan mendasar bahwa keunggulan Rusia dalam dimensi waktu, ruang, dan massa militer belum ditangani secara memadai (Mälksoo, 2024). Ia juga menekankan bahwa signifikansi politik dari postur eFP pra-2022 jauh melampaui kredibilitas militernya yang sesungguhnya (Mälksoo, 2024). Tanpa infrastruktur fisik berupa parit anti-tank, bunker terkamufase, dan titik-titik pertahanan yang diperkuat di lokasi-lokasi paling rawan, pasukan eFP beroperasi di medan terbuka tanpa kedalaman pertahanan yang memungkinkan mereka menahan gelombang ofensif awal sambil menunggu datangnya bala bantuan (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025).

Keterbatasan keempat berdimensi kredibilitas. Wilson Center (2024), berdasarkan wawancara dengan para profesional keamanan di Baltik dan Polandia, mengungkapkan bahwa terdapat keraguan yang signifikan terhadap apakah keberadaan pasukan *tripwire* eFP benar-benar mampu meyakinkan calon agresor bahwa seluruh aliansi akan bereaksi secara kohesif dan cepat apabila terjadi serangan terbatas yang ditargetkan pada satu negara anggota secara spesifik. Seluruh keterbatasan ini menempatkan eFP dalam posisi yang, dalam terminologi *conventional deterrence* Mearsheimer, dapat diidentifikasi sebagai postur *punishment* yang lemah dan tidak disertai kapabilitas *denial* yang memadai (Mearsheimer, 1983). Mekanisme *tripwire* yang menjadi inti konsep eFP bergantung sepenuhnya pada kepercayaan calon agresor bahwa ancaman eskalasi aliansi akan dieksekusi secara penuh dan cepat. Ketika kepercayaan tersebut diragukan, calon agresor mulai memperhitungkan kemungkinan bahwa serangan kilat sebelum aliansi sempat berkonsolidasi merupakan pilihan strategis yang layak dipertimbangkan. Pada titik inilah fungsi *deterrence* dari *tripwire* kehilangan efektivitasnya secara substansial. Kesenjangan fundamental inilah yang menjadi dasar pembenaran mengapa Polandia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan NATO dan terdorong untuk meluncurkan program *Tarcza Wschód* sebagai pelengkap kapabilitas *denial* yang tidak dapat ditunda lebih lama (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025).

### **Penguatan Strategi Pertahanan *Homeland Defense Act 2022* Menuju *Tarcza Wschód* Program**

Sejak pengesahan *Homeland Defence Act* pada 11 Maret 2022, pengesahan ini menandai titik transformasi mendasar dalam arsitektur pertahanan nasional Polandia. Invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menjadi katalis langsung yang mendorong Polandia merombak total kerangka pertahanannya dari tatanan regulasi yang tersebar dan tidak terintegrasi menjadi satu sistem pertahanan nasional yang koheren dan berorientasi pada penguatan kapabilitas militer secara menyeluruh (Kobielski, 2022). Signifikansi regulasi ini melampaui sekadar pembaruan hukum formal, sebab ia meletakkan fondasi transformasi militer yang bertumpu pada tiga elemen struktural yang saling menopang, yaitu peningkatan jumlah personel aktif dan cadangan menuju target 300.000 prajurit, percepatan pengadaan alutsista berat berkapabilitas ofensif tinggi termasuk tank *M1A2 Abrams* dari Amerika Serikat dan sistem artileri *K2 Black Panther* serta *K9 Thunder* dari Korea Selatan, serta penyatuan tata kelola pertahanan ke dalam satu kerangka hukum komprehensif (Marcinek dan Boston, 2023).

Tujuan jangka panjang dari keseluruhan transformasi ini bukan sekadar membangun angkatan bersenjata yang responsif terhadap serangan, melainkan membangun postur pertahanan yang keberadaannya sendiri telah cukup mengubah kalkulasi rasional calon agresor bahwa agresi terhadap Polandia tidak akan menghasilkan keuntungan strategis yang sepadan (Deni, 2023). Hal yang perlu digarisbawahi dalam menganalisis transformasi pertahanan Polandia adalah realitas bahwa modernisasi yang dilakukan bukanlah respons terhadap serangan yang sedang

berlangsung, melainkan respons antisipatif yang digerakkan oleh persepsi ancaman yang mendalam terhadap kemungkinan agresi di masa mendatang. Mearsheimer menegaskan bahwa *deterrence* beroperasi pada level kalkulasi rasional, dan oleh karena itu pihak yang bertahan pun melakukan kalkulasi serupa dalam membangun postur pertahanannya jauh sebelum konflik aktual dimulai (Mearsheimer, 1983). Negara yang bertindak rasional membangun kapabilitas pertahanan justru ketika ancaman masih bersifat potensial, karena ketika ancaman telah berubah menjadi aktual, jendela waktu untuk membangun pertahanan yang memadai telah tertutup sepenuhnya.

Dalam kerangka inilah *Homeland Defence Act* dipahami sebagai wujud *deterrence* yang antisipatif, digerakkan oleh ketakutan struktural terhadap potensi agresi yang diyakini nyata meskipun belum terwujud secara fisik di wilayah Polandia. Ketakutan struktural yang menggerakkan modernisasi pertahanan Polandia tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengalaman historis yang tertanam dalam memori kolektif bangsa. Pengalaman pembagian wilayah Polandia sebanyak tiga kali oleh Rusia, Prusia, dan Austria pada periode 1772 hingga 1795 telah membentuk kesadaran institusional bahwa posisi geografis Polandia di Dataran Eropa Utara yang terbuka menjadikannya rentan secara inheren terhadap agresi dari arah timur (Sus, 2025). Ketakutan ini memperoleh dimensi yang semakin konkret ketika aneksasi Krimea pada tahun 2014 membuktikan secara empiris bahwa Rusia bersedia menggunakan kekuatan militer konvensional untuk mengubah batas wilayah negara berdaulat di Eropa. Bagi Polandia, peristiwa ini merupakan validasi langsung atas skenario ancaman yang selama ini dianggap oleh sebagian pihak berlebihan (Rerung, 2020).

Dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, tidak ada jaminan keamanan eksternal yang dapat diandalkan sepenuhnya, sehingga *self-help* melalui penguatan kapabilitas militer internal menjadi imperatif struktural (Waltz, 1979). Dalam konteks inilah, anggaran pertahanan Polandia secara resmi dinaikkan menjadi 3% PDB pada tahun 2023 dan mendekati 5% pada tahun 2024, menjadikan Polandia sebagai anggota NATO dengan proporsi belanja pertahanan tertinggi di seluruh aliansi (Torbicka, 2025). Kendati demikian, *Homeland Defence Act* tahun 2022 secara inheren hanya menjawab satu dimensi pertahanan, yaitu seberapa besar kekuatan militer yang dapat dihimpun untuk mekanisme *deterrence by punishment*. Staf Umum Angkatan Bersenjata Polandia (*Sztab Generalny Wojska Polskiego*) secara resmi mengakui kesenjangan yang tersisa dalam dokumen perencanaan tahun 2024, yang menetapkan kondisi akhir yang hendak dicapai sebagai “*teren przygraniczny przygotowany do obrony i natychmiastowej projekcji sił*” (wilayah perbatasan yang dipersiapkan untuk pertahanan sekaligus mampu mendukung proyeksi kekuatan secara segera) (SGWP, 2024). Dokumen tersebut secara eksplisit mengidentifikasi bahwa persoalan yang belum terjawab bukan pada besaran kekuatan tempur, melainkan pada ketiadaan infrastruktur fisik yang menjamin kekuatan tersebut dapat dioperasikan secara efektif di titik ancaman paling kritis sejak fase awal operasi dimulai.

Atas dasar kesenjangan struktural inilah, pada 18 Mei 2024, Perdana Menteri Donald Tusk secara resmi mengumumkan *Narodowy Program Odstraszenia i Obrony Tarcza Wschód (Eastern Shield)* sebagai respons yang melengkapi dimensi pertahanan yang tidak terpenuhi oleh *Homeland Defence Act*. Program ini kemudian diformalkan melalui Resolusi Dewan Menteri Nomor 58 tertanggal 10 Juni 2024 dengan alokasi anggaran sebesar 10 miliar Zloty Polandia yang akan dibelanjakan dalam rentang waktu 2024 hingga 2028 (Ministerstwo Obrony Narodowej, 2024).

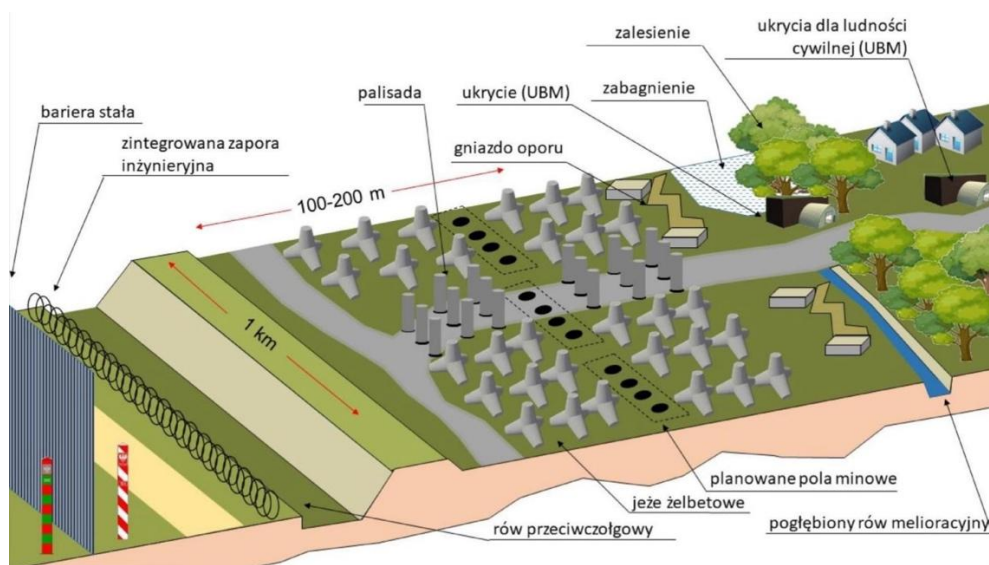
### ***Tarcza Wschód Programme* Sebagai Penguatan Modernisasi Dalam Kerangka *Conventional Deterrence***

Program *Tarcza Wschód* merepresentasikan operasionalisasi paling komprehensif dari prinsip *deterrence by denial* dalam konteks pertahanan Polandia kontemporer. Logika *denial* bekerja dengan meyakinkan calon agresor bahwa tidak ada strategi ofensif yang tersedia yang dapat menjamin pencapaian tujuan militer dengan biaya yang masih dapat ditoleransi, sehingga keputusan menyerang menjadi irasional bahkan sebelum operasi dimulai (Mearsheimer, 1983). Program yang mencakup seluruh perbatasan timur dan utara Polandia sepanjang 700 hingga 800 kilometer dengan kedalaman fortifikasi hingga 50 kilometer ke dalam wilayah perbatasan ini dirancang secara eksplisit untuk menciptakan kondisi tersebut, dan secara khusus menargetkan Koridor Suwałki sebagai prioritas implementasi pertama (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025). Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Polandia Jenderal Wiesław Kukuła dalam presentasi resmi pada 27 Mei 2024 menguraikan empat tujuan strategis program ini, yaitu peningkatan kapabilitas *Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance* (ISR), pembangunan sistem *counter-mobility*, peningkatan mobilitas pasukan pertahanan, serta peningkatan keamanan prajurit dan penduduk sipil di kawasan perbatasan timur (SGWP, 2024).

Pada komponen pertama berupa sistem ISR berlapis mencakup dimensi antariksa, udara, dan darat yang terintegrasi ke dalam satu jaringan pemantauan *real-time*. Pada dimensi antariksa, Polandia menandatangani kontrak dengan Airbus Defence and Space pada Desember 2022 untuk pengadaan dua satelit *Pléiades Neo* beresolusi 30 sentimeter yang dijadwalkan beroperasi pada 2027, dilengkapi dengan program satelit nasional *MikroGlob* melalui empat mikrosatelit optik yang dikontrakkan kepada perusahaan Creotech Instruments pada Desember 2024, serta tiga satelit SAR beresolusi 25 sentimeter melalui program *MikroSAR* dari perusahaan ICEYE (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025). Pada dimensi udara, Polandia mengoperasikan 24 drone Bayraktar MALE yang pengirimannya diselesaikan pada 2024, dilengkapi dengan dua sistem *Aerial Early Warning and Control* (AEW dan C) Saab 340 yang diterima pada Juni 2024 (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025). Kapabilitas ISR yang komprehensif ini merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas seluruh komponen *denial* lainnya, karena kemampuan mendeteksi pergerakan kekuatan agresor secara dini memungkinkan aktivasi seluruh lapis pertahanan sebelum kekuatan ofensif mencapai garis depan.

Komponen kedua berupa sistem *counter-mobility* berlapis tiga yang secara spesifik dirancang untuk menghambat strategi ofensif agresor sejak fase paling awal. Sebagaimana divisualisasikan oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Polandia, lapis pertama terdiri dari parit anti-tank sedalam empat meter, lapis kedua mencakup enam baris rintangan beton berbentuk bintang yang dikenal sebagai *jeź* yang dapat dikombinasikan dengan penanaman ranjau di celah antar baris, dan lapis ketiga adalah bunker-bunker terkamufase yang menyediakan posisi bertahan bagi kendaraan lapis baja dan personel untuk operasi tembak-dan-berlindung (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025).

#### Gambar 4. Visualisasi Zona Perbatasan *Tarcza Wschód*



*Sumber: Ministerstwo Obrony Narodowej, 2024*

Pemerintah Polandia juga memanfaatkan hambatan alam kawasan, terutama Rawa Biebrza di kawasan timur laut yang berdekatan dengan Koridor Suwałki, sebagai komplemen alami bagi fortifikasi buatan yang semakin mempersempit pilihan manuver agresor (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025). Pada akhir November 2024, seksi pertama sepanjang 2,3 kilometer di kawasan Dąbrówka, Warmia-Masuria, telah diselesaikan dan diinspeksi langsung oleh Perdana Menteri Tusk, sementara pada Juli 2025 seksi tersebut telah diperpanjang menjadi 20 kilometer dengan pekerjaan berlangsung tujuh hari dalam seminggu sepanjang tahun tanpa henti (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025).

Komponen ketiga mencakup infrastruktur mobilitas ganda yang memastikan pasukan pertahanan dapat bergerak lebih cepat daripada agresor di dalam wilayah yang dipersiapkan. Kementerian Infrastruktur berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk meningkatkan kesiapan logistik jaringan jalan melalui pengembangan sistem *rest area* jalur ganda di sepanjang jalan tol dan jalan ekspres yang dapat difungsikan sebagai titik persiapan konvoi militer, sementara Staf Umum mengembangkan kapabilitas penyeberangan sungai secara cepat melalui penimbunan komponen jembatan modular di dekat rintangan air utama serta persiapan *bridgehead* di lokasi-lokasi strategis (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025). Seluruh komponen ini secara bersama-sama menjawab kesenjangan yang diidentifikasi oleh dokumen SGWP 2024, yaitu kondisi akhir berupa wilayah perbatasan yang tidak hanya dipersiapkan untuk bertahan tetapi juga mampu mendukung proyeksi kekuatan secara segera.

Pengutan modernisasi dari *Homeland Defence Act 2022* kedalam *Tarcza Wschód 2024* memperlihatkan adanya kedua mekanisme *conventional deterrence* Mearsheimer yang saling melengkapi. Dimana, *Homeland Defence Act* membangun kapabilitas *deterrence by punishment* melalui akumulasi kekuatan tempur yang besar sehingga calon agresor memperhitungkan biaya pembalasan yang tidak sebanding. Disisi lain, program *Tarcza Wschód* membangun kapabilitas *deterrence by denial* melalui infrastruktur fisik yang menjamin tidak ada strategi ofensif yang dapat mencapai tujuan militer dengan kecepatan yang diperlukan sebelum respon pertahanan terkonsolidasi (Mearsheimer, 1983). Pada gilirannya, kombinasi ini menciptakan kondisi di mana Rusia sebagai calon agresor tidak hanya menghadapi ancaman pembalasan yang besar, tetapi juga meyakini bahwa serangan terhadap koridor tersebut akan gagal mencapai tujuan operasional

dalam jendela waktu yang menjadi prasyarat strategi ofensif yang menguntungkan, sehingga keputusan untuk menyerang menjadi tidak rasional sejak sebelum operasi dimulai (Mearsheimer, 1983).

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Tarcza Wschód Programme* dapat dipahami sebagai respons kebijakan pertahanan yang lahir dari akumulasi tiga determinan struktural yang saling berkaitan. Determinan pertama adalah kesenjangan kapabilitas yang tidak sepenuhnya teratasi dalam *Homeland Defence Act 2022*, yang lebih menitikberatkan pada peningkatan kekuatan tempur melalui mekanisme *deterrence by punishment* daripada penguatan infrastruktur pertahanan fisik di wilayah perbatasan, sebagaimana diakui secara resmi oleh Staf Umum Angkatan Bersenjata Polandia dalam dokumen perencanaan 2024 (SGWP, 2024). Determinan kedua adalah keterbatasan struktural *enhanced Forward Presence* (eFP) NATO yang mencakup skala pasukan yang jauh di bawah ambang minimum pertahanan mendalam, karakter rotasional yang menciptakan kesenjangan pengetahuan medan, absennya infrastruktur pertahanan fisik di titik paling rawan, serta *credibility gap* dalam mekanisme *tripwire* yang melemahkan fungsi pencegahan aliansi secara substansial (Mälksoo, 2024; Shlapak dan Johnson, 2016; Wilson Center, 2024). Determinan ketiga adalah konfigurasi ancaman dua arah yang semakin konkret melalui penempatan permanen sistem Iskander-M di Kaliningrad dan transformasi geopolitik Belarus pasca-2020, yang secara bersamaan menciptakan potensi skenario *fait accompli* militer terhadap *Suwałki Land Corridor* dalam rentang waktu yang lebih pendek dari kemampuan konsolidasi respons kolektif NATO (Torbicka, 2025; Shlapak dan Johnson, 2016).

Dalam kerangka *Conventional Deterrence* Mearsheimer (1983), *Tarcza Wschód* dapat dipahami sebagai operasionalisasi *deterrence by denial* yang melengkapi mekanisme *deterrence by punishment* yang telah dibangun *Homeland Defence Act 2022*. Integrasi kedua mekanisme ini membentuk arsitektur daya tangkal konvensional yang komprehensif, di mana calon agresor tidak hanya menghadapi ancaman pembalasan besar melalui mekanisme punishment, tetapi juga meyakini bahwa tidak ada strategi ofensif yang dapat menjamin pencapaian tujuan militer di kawasan *Suwałki Land Corridor* dengan kecepatan dan biaya yang masih dapat ditoleransi, sehingga keputusan untuk menyerang menjadi tidak rasional sejak sebelum operasi dimulai (Mearsheimer, 1983). Kajian selanjutnya perlu mengevaluasi efektivitas aktual implementasi *Tarcza Wschód* pasca-penyelesaian konstruksi pada 2028 seiring dinamika postur militer Rusia yang terus berkembang, serta mengkaji dimensi integrasi regional antara *Tarcza Wschód* dan *Baltic Defence Line* yang dikembangkan Estonia, Latvia, dan Lithuania sebagai satu kesatuan arsitektur pencegahan kawasan yang mensyaratkan koordinasi lintas batas melampaui inisiatif nasional tunggal (Konrad-Adenauer-Stiftung, 2025).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, dalam proses penyelesaian penelitian ini. Pada hal pertama, penulis memanjatkan rasa syukur kepada diri sendiri atas ketekunan, semangat, dan komitmen yang tidak pernah padam dalam menyelesaikan penelitian ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Kedua, penulis menyampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga yang telah menjadi sumber dukungan yang senantiasa hadir tanpa syarat dalam setiap langkah perjalanan akademis penulis. Ketiga, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan yang penuh kesabaran, arahan, serta masukan akademis yang

sangat berarti sehingga penelitian ini dapat terwujud dengan baik. Keempat, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat, berbagi pemikiran, serta hadir sebagai ruang bertukar gagasan yang menginspirasi selama proses penelitian berlangsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). Sage Publications.
- Czulda, R. (2023). Poland's military modernization: Implications for NATO's eastern flank. *Comparative Strategy*, 42(3), 245–268.
- Dall, A. C., & Duarte, É. E. (2022). Military power and conventional deterrence: A literature review. *Revista de Relaciones Internacionales*, 17(1), 101–118. <https://doi.org/10.18359/ries.5793>
- Deni, J. R. (2023). *Poland's defense transformation and NATO's eastern flank*. Atlantic Council.
- Kemper, C. C., Helgestad, M. J., Colvin, M. N., & Cox, M. S. (2018). Design to execution into the Suwalki Gap. *Army University Press*. <https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/Online-Exclusive/2018-OLE/Design-to-Execution/>
- Kobielski, M. (2022). *Homeland Defence Act: Poland's strategic transformation*. Polish Institute of International Affairs.
- Konrad-Adenauer-Stiftung. (2025). *Poland's Eastern Shield: Strengthening deterrence at the EU's eastern border*. KAS Country Report Poland. <https://www.kas.de/en/web/polen/single-title/-/>
- Koziej, S. (2024). *Tarcza Wschód w systemie bezpieczeństwa Polski* [PDF]. <https://koziej.pl/wp-content/uploads/2024/05/Tarcza-Wschód-w-systemie-bezpieczeństwa.pdf>
- Lipka, R., Wernik, J., & Dziegiel, W. (2025). *Guarding the alliance's eastern frontiers*. Defense AI Observatory. [https://defenseai.eu/wp-content/uploads/2025/09/daio\\_study2529\\_guarding\\_the\\_alliances\\_eastern\\_frontiers\\_li\\_pka\\_wernik\\_dziegiel.pdf](https://defenseai.eu/wp-content/uploads/2025/09/daio_study2529_guarding_the_alliances_eastern_frontiers_li_pka_wernik_dziegiel.pdf)
- Mapping Digiworld Pvt Ltd. (2026). *Poland map*. <https://www.mapsofindia.com/world-map/poland/>
- Marcinek, K., & Boston, S. (2023). *Polish armed forces modernization: A new cornerstone of European security?* RAND Corporation. [https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research\\_reports/RRA2900/RRA2971-1/RAND\\_RRA2971-1.pdf](https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RRA2900/RRA2971-1/RAND_RRA2971-1.pdf)
- Mearsheimer, J. J. (1983). *Conventional deterrence*. Cornell University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt1rv61v2>
- Ministerstwo Obrony Narodowej. (2024a). *Tarcza Wschód: Prezentacja Sztabu Generalnego Wojska Polskiego*, 27 05 2024 [PDF]. [https://tarczawschod.wp.mil.pl/u/59/Of/590f9be9-9609-4a9a-ab5d-fb5371503b5a/tarcza\\_wschod\\_prezentacja\\_sgwp\\_27052024.pdf](https://tarczawschod.wp.mil.pl/u/59/Of/590f9be9-9609-4a9a-ab5d-fb5371503b5a/tarcza_wschod_prezentacja_sgwp_27052024.pdf)
- Ministerstwo Obrony Narodowej. (2024b). *Tarcza Wschód: Ulotka informacyjna* [PDF]. [https://tarczawschod.wp.mil.pl/u/9b/2b/9b2b06d2-f368-4eae-bde1-b3d2664c01ec/tarcza\\_wschod\\_-\\_ulotka.pdf](https://tarczawschod.wp.mil.pl/u/9b/2b/9b2b06d2-f368-4eae-bde1-b3d2664c01ec/tarcza_wschod_-_ulotka.pdf)

- Ministerstwo Obrony Narodowej.  
(2024c). *Tarczawschod.wp.mil.pl*. <https://tarczawschod.wp.mil.pl/>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. (2021). *NATO's enhanced Forward Presence in Latvia* [Map]. <https://www.mfa.gov.lv/en/nato-enhanced-forward-presence-latvia>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. (2025). *NATO's enhanced Forward Presence: Five years of strengthening collective defence in the Baltic states*. <https://www.mfa.gov.lv/en/article/natos-enhanced-forward-presence>
- Moraczewska, A. (2025). The international dimension of the Polish Deterrence and Defence Programme – the "East Shield." *Yearbook of the Institute of East-Central Europe*, 23(3), 45–62. <https://doi.org/10.36874/RIESW.2025.3.3>
- Morgan, P. M. (2003). *Deterrence now*. Cambridge University Press.
- National Security Strategy of the Republic of Poland. (2020). *National Security Strategy of the Republic of Poland*. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. <https://www.bbn.gov.pl/en/strategic-documents/national-security-strat/6411,National-Security-Strategy-of-the-Republic-of-Poland.html>
- O'Hanlon, M. E. (2019). *A report from NATO's front lines*. Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/articles/a-report-from-natos-front-lines/>
- Parafianowicz, R. (2017). The military-geographical significance of the Suwałki Gap. *Security and Defence Quarterly*, 17(4), 3–20. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7839>
- Perwita, A. A. B., & Rachmawati, W. D. (2018). The modernization of Poland defense forces as a response towards Russian military presence in Kaliningrad Oblast (2014–2017). *Global Strategis*, 12(1), 183–202.
- Rerung, R. (2020). *Strategi keamanan Polandia dalam merespon pengembangan kapabilitas militer Rusia tahun 2016–2019*.
- Schelling, T. C. (1960). *The strategy of conflict*. Harvard University Press.
- Schelling, T. C. (1966). *Arms and influence*. Yale University Press.
- Shlapak, D. A., & Johnson, M. (2016). *Reinforcing deterrence on NATO's eastern flank: Wargaming the defense of the Baltics*. RAND Corporation. <https://doi.org/10.7249/RR1253>
- Snyder, G. H. (1961). *Deterrence and defense: Toward a theory of national security*. Princeton University Press.
- Sztab Generalny Wojska Polskiego. (2024). *Program Tarcza Wschód: Założenia operacyjne* [Eastern Shield Programme: Operational framework]. Ministry of National Defence of the Republic of Poland. <https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/tarcza-wschod>
- Torbicka, A. (2025). Poland's defence transformation 2022–2024: From punishment to denial. *Polish Institute of International Affairs Policy Paper*, 3(2025), 1–18. <https://www.pism.pl/publications/polands-defence-transformation>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.
- Wilson Center. (2024). *The evolving tripwire on NATO's eastern flank*. Wilson Center Security Brief. <https://www.wilsoncenter.org/article/evolving-tripwire-natos-eastern-flank>
- Wyczawski, T. (2025). Long war, hybridisation and systemic resilience: Russia's multi-domain challenge to the Euro-Atlantic security order. *Acta Humanities*, 3(3), 217–233. <https://doi.org/10.5709/ah-03.03.2025-06>
- Zikri, K., & Hanapi, R. L. I. (2021). *Geografi regional dunia: Eropa Utara dan Eropa Tengah*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hcmaz>

Zyguła, A., & Piskorska, B. (2024). East Shield – a mechanism for strengthening the security and resilience of Central and Eastern European countries using the example of Poland's eastern border. *Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej*, 22(2), 183–197.